

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT LKPJ BUPATI T.A 2018

Oleh: Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Aula Bappeda, 18 Juni 2019

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ T.A 2018

- * Perbaikan dan validasi data administrasi kependudukan--- menggunakan data BPS
- * Perbaikan perencanaan, peningkatan serapan anggaran dan validasi laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD 2018-- Format laporan APBD perubahan
- * Perbaikan kinerja dan peningkatan serapan anggaran SKPD (di bawah 80 %)-- pengendalian pada masing masing SKPD

Administrasi Kependudukan dan Pembangunan

- * Terdapat selisih jumlah penduduk pada tahun 2017 karena menggunakan dua sumber yang berbeda (BPS dan Disdukcapil). Solusi : Ke depan cukup menggunakan satu sumber data yakni dari BPS
- * Perlu perhatian lebih terhadap kecamatan lain (di luar Arsel) dalam pembagian porsi pembangunan agar tercipta pemerataan

Ketenagakerjaan dan Pendidikan

- * Pengangguran terbuka mencapai 4.902 jiwa pada tahun 2018 sehingga memerlukan peran pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan--- program/kegiatan apa yang sudah dan akan dilakukan untuk menekan pengangguran ?
- * Jumlah penduduk sekolah tahun 2018 turun signifikan mencapai 47,57 %. Upaya yang telah dan akan dilakukan apa saja ?
- * Dalam mengatasi persoalan tenaga kerja dan pendidikan apakah sudah ada sinergi antara SKPD dengan mengacu pada RPJMD ?

PEREKONOMIAN

- * Sejumlah komoditas unggulan daerah masih mengalami banyak kendala dalam masalah produksi, distribusi dan pemasaran. Upaya yang telah dan akan dilakukan SKPD apa saja ? Kapan ?
- * Apakah sudah ada sinergi antar SKPD dalam mendorong penguatan komoditas unggulan daerah ?

PENDAPATAN DAERAH

- * Capaian realisasi pendapatan daerah hanya 96,73% dari target sehingga perlu evaluasi dari sisi penetapan target, potensi dan peluang untuk meningkatkan pendapatan
- * Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih kecil yakni hanya 14,59% dan menandakan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih besar

BELANJA DAERAH

- * Total belanja dengan rincian item belanja jumlahnya tidak sama
- * Inkonsistensi data BELANJA HIBAH dalam LKPJ dengan Penjabaran APBD Perubahan 2018
- * Realisasi total belanja daerah hanya 93,10 % dari anggaran total belanja sehingga multiplier effect menjadi tidak optimal

BELANJA DAERAH

- * Rencana penganggaran belanja pegawai terlalu besar dan realisasi tidak optimal (hanya 95,13%). Disarankan untuk dialihkan ke belanja modal
- * Belanja modal hanya dianggarkan 23,55%. Berdasarkan amanat Perpres Nomor 2/2015 semestinya persentase belanja modal minimal **30%**.

PEMBIAYAAN DAERAH

- * SILPA T.A 2018 mencapai Rp.120 M. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran masih rendah dan banyak kegiatan strategis tidak terlaksana. SKPD diminta meningkatkan kinerja dan serapan anggaran
- * Penyertaan modal ke BUMD hendaknya memperhatikan bisnis plan, apakah sudah sepadan dengan kinerja BUMD dan apakah sudah ada analisis investasi sebagaimana amanat Permendagri 52/2012

URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

- * Masih banyak program/kegiatan SKPD yang **serapan anggaran dibawah 80 %** (rekomendasi/catatan terlampir)

PENUTUP

- * Harus dijaga konsistensi antara dokumen perencanaan. Program yang ada dalam APBD harus sama dengan program yang ada di RPJMD, RKPD dan KUA PPAS. Demikian juga antara APBD, Penjabaran APBD dan DPA dan LKPJ.
- * Peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas program yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
- * Penguatan kelembagaan dengan mengoptimalkan institusi yang ada dan tidak melakukan pengembangan jumlah kelembagaan, sehingga dapat menimbulkan inefisiensi anggaran.
- * Perlu melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.